BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pengelolaan Laporan Kegiatan Sosialisasi di Daerah Pemilihan oleh Anggota MPR, merupakan dukungan layanan administratif, keahlian, dan teknis dari Sekretariat Jenderal MPR kepada anggota MPR dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Dalam memberikan layanan terhadap kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan, Sekretariat Jenderal MPR menyiapkan sarana dan prasarana, salah satunya yaitu aplikasi berbasis digital yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan laporan Sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan oleh anggota MPR setelah melaksanakan kegiatannya. Dalam penerapan digitalisasi pengelolaan laporan Sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan, Sekretariat Jenderal MPR menyiapkan panduan yang dituangkan dalam surat edaran Sekretaris Jenderal MPR perihal pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan.

Hasil analisis yang peneliti lakukan, secara keseluruhan indikator efektivitas yaitu perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan dan implementasi, pengendalian dan pengawasan pada penerapan kebijakan prosedur digitalisasi pengelolaan laporan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan telah terpenuhi. Dengan demikian penerapan kebijakan tersebut telah berjalan cukup efektif. Hanya pada beberapa sub indikator saja yang belum efektif antara lain:

1. Kebijakan Digitalisasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan acuan oleh para pemangku kepentingan dalam penggunaan aplikasi belum tersedia dalam peraturan Sekretaris Jenderal MPR yang khusus dan tersendiri.

2. Strategi Penerapan Digitalisasi

Jangka waktu penyerahan belum mencapai target sesuai yang diharapkan.

3. Perencanaan Penerapan Digitalisasi

Blue print digitalisasi pengelolaan laporan Sosialisasi Empat Pilar MPR tidak tersedia.

4. Pemilihan Platform Digital Yang Tepat

Meskipun memiliki berbagai keuntungan, mengunakan platform *google form* juga memiliki kekurangan terutama dalam menentukan hak akses terhadap pengguna, keterbatasan pengembangan fitur, dan keterbatasan media penyimpanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- Melakukan pengembangan menggunakan aplikasi berbasis digital berbasis system informasi dalam pengelolaan laporan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Pemilihan agar pengelolaan laporan berjalan lebih efektif dan efisien.
- 2. Membuat peraturan Sekretaris Jenderal MPR tentang *Standard Operasional Prosedure* (SOP) dan *blue print* Pengelolaan Laporan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di daerah pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Makalah / Artikel

- A. A. Gede Ajusta, S. A. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Departemen HRD PT Sumber Maniko Utama. Mitra Manajemen (JJM Online).
- Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit: Pembaharuan.
- Badan Sosialisasi MPR. (2012). Buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta.
- Bambang Suhartono. (2021). *Bahan Ajar Mata Kuliah Diseminasi Kebijakan:*Part I Introduction Fix. Jakarta.
- Cholid Narbuko, Dkk. (1997). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ernie Trisnawati Sule, Saefullah Kurniawan, (2005). *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media Jakarta.
- Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi. 2016. Pedoman Praktis Menyusun Standard Operating Procedure. Yogyakarta: QUADRANT.
- Georgopolus dan Tannenbaum. (1985). *Efektivitas Organisasi*. PT. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Gie, The Liang. (1998). Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Handayaningrat, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV.Haji Masagung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. (1987). *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta.
- Margono. (1997). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muntaqo, R. (2017). Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Perkembangan

- Budaya Masyarakat. Jurnal PPKM I.
- Pabundu, Tika. (2008). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*.: Bumi. Aksara, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
- Poerwadarminta. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rukmana, Nana. (2006). Strategic Partnering For Educational Management. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2014). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Edisi Revisi. Jakarta. Cetakan Ketigabelas.
- Suharto, Edi. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- Syamsi, I. (2008). Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar. Jakarta: Bina Aksara.
- Tangkilisan, Hessel N.S. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.
- UMKM. (2023). Digitalisasi Nasional. Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri.

B. Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 15 April 2005 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR.
- Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris

- Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komputer.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3A Tahun 2022 Tentang SPBE.
- Surat Keputusan MPR RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Fraksi dan Kelompok DPD MPR RI Masa Jabatan 2019-2024.
- Surat Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor B-31/PE.01/B-VI/SetjenMPR/04/2023 Tanggal 4 April 2023 Hal Sosialisasi Empat Pilar MPR oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan Tahap III.

C. Website:

- Albertus Adit. (2022). *Penyebab Terjadinya Reformasi, Siswa Sudah Tahu?*. (diakses dari https://edukasi.kompas.com/read/2022/02/11/085645871/penyebab-terjadinya-reformasi-siswa-sudah-tahu?page=all), pada tanggal 15 Juni 2024 Pukul 20.50 WIB.
- Anugerah Ayu Sendari. (2023). 11 Jenis-Jenis Wawancara dalam Jurnalistik, Ketahui Tips Melakukannya. (diakses dari https://www.liputan6.com/hot/read/5294409/11-jenis-jenis-wawancara-dalam-jurnalistik-ketahui-tips-melakukannya?page=6) pada tanggal 17 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB).
- https://integrasolusi.com/blog/simak-ini-akibatnya-apabila-dokumen-tidak-dikelola-dengan-baik/
- Natasya Humaira. (2023). 5 Contoh Konflik Politik Terbesar yang Pernah Terjadi di Indonesia. (diakses dari https://news.detik.com/berita/d-6791236/5-contoh-konflik-politik-terbesar-yang-pernah-terjadi-di-indonesia), pada

tanggal 15 Juni 2024 Jam 18:54 WIB.

Novi V. (2023). *Pengertian Laporan, Fungsi, Ciri, Jenis, Struktur, & Langkah Pembuatan*. (diakses dari https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-laporan/) pada tanggal 6 Agustus 2023.

Salsabila Syahira. (2023). *Cara Membuat Laporan Kegiatan dengan Tepat*. (diakses dari https://umsu.ac.id/berita/cara-membuat-laporan-kegiatan-dengan-tepat/)

https://id.wikipedia.org/wiki/Cetak_biru www.sipilarmpr.com www.ematrix.setjen.mpr.go.id

POLITEKNIK STIALAN JAKARTA